

Daftar Pustaka.

Buku-buku

Kitab Suci Al Qur'an.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Ateng Safrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.

Bahder Johan Nasution, *Motode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2010.

Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Irwan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, Katalog Dalam Terbitan, Yogyakarta, 2006.

Parlindungan, *Komentar Atau Undang Undang Perumahan dan Pemukiman & Undang Undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Sarman & Moh Taufik Makaro, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Sofi Puspasari & Sutaryo, *Integrasi Agraria – Pertanahan Dan Tata Ruang*, STPN Press, Yogyakarta, 2017.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Waskito & Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Perundang undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia,

<http://setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah-ditetapkan-melalui-perda-harus-disetujui-pemerintah-pusat/>

http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar,

http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar,
Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*.
Selamat Datang Kementerian Agraria,

<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/30/18262971/Selamat.Datang.Kementerian.Agraria>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia,